



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (AUDITED)

Tingkat UAKPA
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Palembang

KPKNL
PALEMBANG
PAYO

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, KPKNL Palembang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/Pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Palembang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto
NIP 197403161998031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Laporan Operasional	4
III. Laporan Perubahan Ekuitas	5
IV. Neraca.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Neraca.....	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
VI. Lampiran	48

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
PALEMBANG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG BLOK C LANTAI 1-2
JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 4 PALEMBANG
TELEPON (0711) 352574, FAXIMILE (0711) 350801**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) untuk Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto
NIP 197403161998031001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.551.904.271 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp31.551.904.271 atau mencapai 142,58 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp22.129.246.000. .

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.239.510.047 atau mencapai 84,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.644.771.000.

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.040.314.490 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.461.031.517 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp28.579.282.973, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp127.024.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp28.706.306.973.

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp17.100.186.574, ditambah Surplus-LO sebesar Rp28.706.306.973 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar -28.453.022.765 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp17.353.470.782

4. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.121.934.268 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp801.702.740; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17.319.578.513 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp653.015. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp768.463.486 dan Rp17.353.470.782.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	22.129.246.000	31.551.904.271	142,58%	18.874.751.089
JUMLAH PENDAPATAN		22.129.246.000	31.551.904.271	142,58%	18.874.751.089
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	2.482.253.000	2.077.010.047	83,67%	2.279.989.447
Belanja Modal	B.2.3	162.518.000	162.500.000	99,99%	80.619.517
Belanja Bantuan Sosial	B.3	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2.644.771.000	2.239.510.047	84,68%	2.360.608.964

II. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	31.040.314.490	19.226.196.003
Jumlah Pendapatan		31.040.314.490	19.226.196.003
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	231.246.786	197.602.543
Beban Barang dan Jasa	D.4	974.205.429	940.686.974
Beban Pemeliharaan	D.5	304.261.171	359.186.755
Beban Perjalanan Dinas	D.6	606.779.266	794.321.465
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	344.547.303	213.362.706
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(8.438)	(33.750)
Jumlah Beban		2.461.031.517	2.505.126.693
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		28.579.282.973	16.721.069.310
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.11	127.024.000	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		127.024.000	
SURPLUS/DEFISIT - LO		28.706.306.973	16.721.069.310

III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	17.100.186.574	16.073.938.354
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	28.706.306.973	16.721.069.310
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	-	205.123
Koreksi Nilai Persediaan	E.41	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.42	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.43	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.44	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.45	-	205.123
	E.46	-	-
Jumlah		-	205.123
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(28.453.022.765)	(15.695.026.213)
		253.284.208	1.026.248.220
EKUITAS AKHIR	E.6	17.353.470.782	17.100.186.574

IV. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG NERACA

PER 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	1	7.329.282
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	768.463.486	3.603.870.786
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	0	7000000
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	31.121.480	406.670.480
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	0	1.687.500
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.8	0	-8.438
Persediaan	C.9	2.117.773	34.631.878
Persediaan yang Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		801.702.740	4.061.181.488
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jgk Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.14	13.021.688.389	13.021.688.389
Tanah Belum Diregister	C.15	-	-
Peralatan dan Mesin	C.16	4.037.767.859	3.266.848.307
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.17	-	-
Gedung dan Bangunan	C.18	3.642.589.370	3.642.589.370
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	17.539.525	17.539.525
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	-3.400.006.630	-3.304.600.853
Jumlah Aset Tetap		17.319.578.513	16.644.064.738

ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.23	361.093.641	1.530.117.307
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.24	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	-360.440.626	-1.530.117.307
Jumlah Aset Lainnya		653.015	0
JUMLAH ASET		18.121.934.268	20.705.246.226
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	768.463.486	3.605.059.652
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.29	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		768.463.486	3.605.059.652
JUMLAH KEWAJIBAN		768.463.486	3.605.059.652
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	17.353.470.782	17.100.186.574
JUMLAH EKUTAS		17.353.470.782	17.100.186.574
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.121.934.268	20.705.246.226

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang berkedudukan di Jalan Kapten A Rivai No.04, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Melalui peran tersebut diharapkan pelayanan di bidang kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada stakeholders dapat ditingkatkan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang berkomitmen dengan visi ***“menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel;
- Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Pada Tahun 2025 KPKNL Palembang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sangat baik yaitu 114,83.

Selama Tahun 2025, output strategis yang telah dicapai oleh KPKNL Palembang sebagai berikut:

1. Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)

No	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Rincian Output
1	4798.FAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	58.416.000	48.676.820	83,33%	898	1255	100%

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah

sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Palembang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Palembang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Palembang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada

bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

9. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Sistem
Akuntansi
Tingkat
Instansi
(SAKTI)*

10. Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)

Mulai tahun 2018 KPKNL Palembang telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara pengeluaran, aset tetap, persediaan dan General Ledger Pelaporan (GLP). Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis full akrual.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22.129.246.000	22.129.246.000
Jumlah Pendapatan	22.129.246.000	22.129.246.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.453.591.000	2.547.253.000
Belanja Modal	167.293.000	162.518.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2.620.884.000	2.709.771.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.551.904.271 atau mencapai 142,58 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp22.129.246.000. Pendapatan KPKNL Palembang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp31.551.904.271. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22.129.246.000	31.551.904.271	142,58
Jumlah	22.129.246.000	21.543.357.338	97,35

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.551.904.271 dan Rp18.874.751.089. Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 144,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	31.551.904.271	18.874.751.089	67,16
Jumlah	31.551.904.271	18.874.751.089	67,16

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik/turun %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	127.024.000	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	28.841.764.964	16.287.211.270	77,08
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.348.377.430	2.539.036.672	(7,51)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	229.712.434	20.741.115	1.007,52
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	1.687.500	6.750.000	75
Pendapatan Jasa Lainnya	1.500.000	500.000	200
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	20.512.032	(100)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.837.943	-	-
Jumlah	31.551.904.271	18.874.751.089	67,16

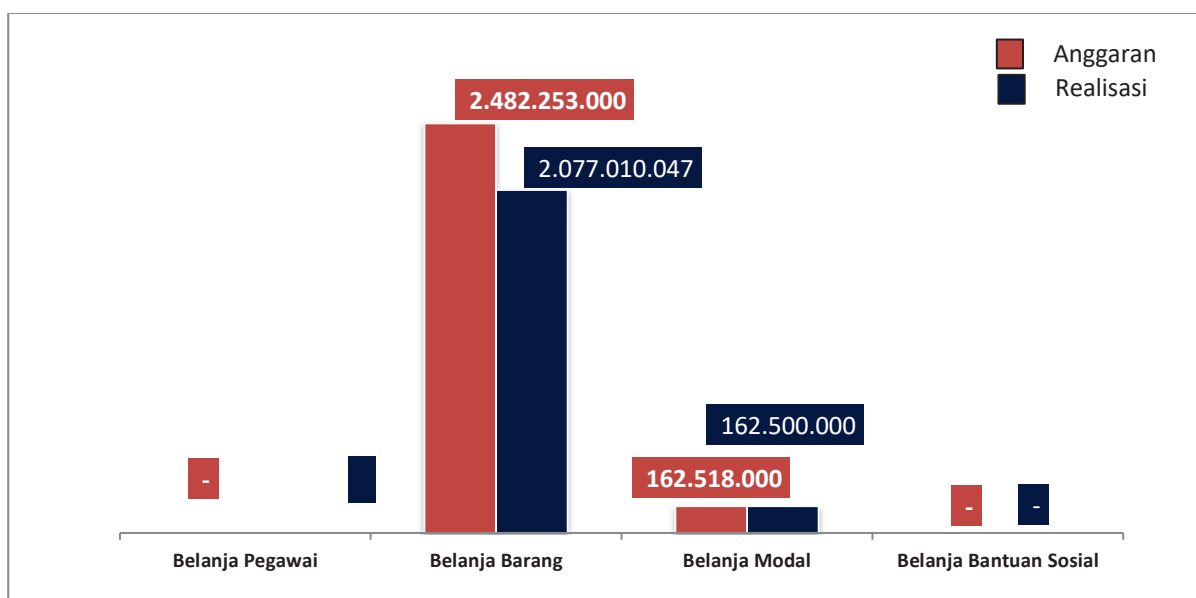
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.239.510.047 atau 84,68 % dari anggaran belanja sebesar Rp.2.644.771.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.482.253.000	2.077.010.047	83,67
Belanja Modal	162.518.000	162.500.000	99,99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2.644.771.000	2.239.510.047	84,68

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,13%.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (*Audited*) Tahunan 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.077.010.047	2.279.989.447	(8,9)
Belanja Modal	162.500.000	80.619.517	101,56
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2.239.510.047	2.360.608.964	(5.13)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Mulai tahun 2021 telah dilaksanakan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN, sehingga tidak ada anggaran Belanja Pegawai di KPKNL Palembang.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.077.010.047 dan Rp2.279.989.447. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 8,90% dari Realisasi TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	860.251.129	768.129.774	11,99
Belanja Barang Non Operasional	96.221.800	132.603.700	(27,44)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	197.931.681	179.669.820	10,16
Belanja Jasa	18.565.000	39.077.933	(52,49)
Belanja Pemeliharaan	297.261.171	366.186.755	(18,82)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	606.779.266	794.321.465	(23,61)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.077.010.047	2.279.989.447	(8,9)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.077.010.047	2.279.989.447	(8,9)

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp162.500.000 dan Rp80.619.517. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 101,56% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh tahun 2020 hanya ada belanja modal peralatan mesin untuk alat-alat kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.500.000	80.619.517	101,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja	162.500.000	80.619.517	101,56

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp162.500.000 dan Rp80.619.517, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 dan 2024.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2025 maupun tahun 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya pada tahun 2025 maupun tahun 2024.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial baik pada tahun 2025 maupun tahun 2024. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

C.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp31.040.314.490 dan Rp19.226.196.003. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 61,45. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	Naik/ Turun %
Pendapatan Jasa Lainnya	1.500.000	500.000,00	200,00
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	28.466.215.964	16.658.588.935,00	70,88
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.348.377.430	2.539.036.672,00	(7,51)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	222.383.153	28.070.396,00	692,23
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.837.943	-	-
Jumlah	31.040.314.490,00	19.226.196.003	61,45

C.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

C.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp231.246.786 dan Rp197.602.543. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,19 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.

C.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp974.205.429 dan Rp940.686.974.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,56 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	696.358.849	662.632.574	5,09
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.636.780	13.301.200	(12,51)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	26.709.500	13.920.000	91,88
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	105.840.000	78.276.000	35,21
Beban Bahan	52.621.800	95.403.700	(44,84)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	43.600.000	37.200.000	17,20
Beban Sewa	17.732.500	23.947.500	(25,95)
Beban Langganan Telepon	-	3.906.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	-	12.100.000	(100,00)
Jumlah	974.205.429	940.686.974,00	3,56

C.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp304.261.171 dan Rp359.186.755. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 15,29 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (*Audited*) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29.284.966	45.763.413	(36,01)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	274.976.205	313.423.342	(12,27)
Jumlah	304.261.171	359.186.755	(15,29)

C.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp606.779.266 dan Rp794.321.465. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 23,61 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (*Audited*) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	524.234.266	667.071.465	(21,41)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.545.000	127.250.000	(35,13)
Jumlah	606.779.266,00	794.321.465	(23,61)

C.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

C.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial s untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

C.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp344.547.303 dan Rp213.362.706. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	287.526.452	156.668.364	83,53
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.694.344	56.694.342	0,00
Jumah Penyusutan	344.547.303	213.362.706	61,48
Jumlah	344.547.303	213.362.706	61,48

C.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-8.438 dan Rp-33.750 . Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

C.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp127.024.000 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	127.024.000	-	-
Jumlah	127.024.000,00	-	-

C.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.13 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0.

C.14 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.17.100.186.574 dan Rp.16.073.938.354.

D.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.28.706.306.973,00 dan Rp.16.721.069.310,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

D.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.205.123 yaitu sebagai berikut .

D.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

D.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

D.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

D.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

D.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.205.123.

D.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

D.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-28.453.022.765 dan Rp.-15.695.026.213. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	2.239.510.047
Diterima dari Entitas Lain	(31.551.904.271)
Transfer Keluar	356.366
Transfer Masuk	859.015.093
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(28.453.022.765)

D.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 2.239.510.047, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 31.551.904.271.

D.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp356.366, Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp859.015.093.

D.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

D.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.17.353.470.782,00 dan Rp.17.100.186.574,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

E.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

E.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1 dan Rp.7.329.282. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

E.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp768.463.486 dan Rp3.603.870.786. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

E.4 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp7.000.000. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp7.000.000

pada Tahun 2024 merupakan belanja pemeliharaan kendaraan bermotor yang berupa voucher/kupon BBM.

E.5 Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

E.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp31.121.480. dan Rp406.670.480. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya.

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima terdiri atas kinerja lelang yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2025 namun sampai dengan akhir periode laporan pemenang lelang belum melunasi nilai pokok lelangnya.

E.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp1.687.500. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TGR Tahun 2025 dan 2024

No	Nama	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Sumarlin	0	1.687.500
Jumlah		-	1.687.500

E.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp8.438. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	1.687.500	0,5%	8.438
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	1.687.500		8.438

E.9 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.117.773 dan Rp34.631.878. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

E.10 Persediaan Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.11 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

E. 12 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.

E. 13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
Tahun 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	1%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	1.687.500		8.438

E.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp13.021.688.389. Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1,760 m2	Jalan Murai Kel.9 Ilir Kec Ilir Timur II, Kota Palembang	12.835.987.000
2	102 m2	Grand Hill 7 Blok A.8, Kel Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang	185.701.389
Jumlah			13.021.688.389

E.15 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp4.037.767.859 dan Rp3.266.848.307. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	3.266.848.307
Mutasi tambah:	
Pembelian	162.500.000

Transfer Masuk	915.740.123
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	307.320.571
Saldo per 30 Juni 2025	4.037.767.859
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(3.064.381.421)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	973.386.438

E.17 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

E.18 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.642.589.370 dan Rp3.642.589.370. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	3.642.589.370
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Saldo per 30 Juni 2025	3.642.589.370
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(335.625.209)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	3.306.964.161

E. 19 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. 20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

adalah sebesar Rp17.539.525 dan Rp17.539.525. Aset tetap tersebut berupa monografi (buku perpustakaan).

E. 21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

E. 22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp3.400.006.630 dan Rp3.304.600.853. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.037.767.859	(3.064.381.421)	973.386.438
2	Gedung dan Bangunan	3.642.589.370	(335.625.209)	3.306.964.161
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	17.539.525	-	17.539.525
Akumulasi Penyusutan		7.697.896.754	(3.400.006.630)	4.297.890.124

E.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp361.093.641 dan Rp1.530.117.307. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	1.530.117.307
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	307.320.571
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.837.437.878
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(360.440.626)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.476.997.252

E.24 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

E.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp360.440.626 dan Rp1.530.117.307. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	361.093.641	(360.440.626)	-
Total	361.093.641	(360.440.626)	-

E.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp768.463.486 dan Rp3.605.059.652. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

E. 27 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

E. 28 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. 29 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

E. 30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. . Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

E. 31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.353.470.782. dan Rp17.100.186.574. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Palembang Nomor KEP-12/KNL.0402/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Anggaran Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, berikut susunan Penanggung Jawab Pengelola Anggaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Mardhanus Rudiyanto
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Muhamad Christian
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	:	Iswati
Bendahara	:	Yatinemi Arsih Oktavia
Pejabat Pengadaan	:	Agus Mulyana

Penjelasan Perbedaan LRA dan LO masing-masing pos pada CaLK pendapatan dan beban LO

No	Kode Akun	Nama Akun	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih	Penjelasan
1	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	28.841.764.964	28.466.215.964	375.549.000	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 42XXXX)
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	229.712.434	222.383.153	7.329.281	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 42XXXX)
3	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	1.687.500	0	1.687.500	Pencatatan Piutang yang berbeda periode dengan pelunasan piutang
4	522141	Belanja Sewa	18.565.000	17.732.500	832.500	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 52XXXX)

INFORMASI KINERJA UNIT KANTOR WILAYAH/SATKER TAHUN 2025 (AUDITED)

Satker : KPKNL Palembang
Fungsi : (01) Pelayanan Umum
Subfungsi : (01.01) Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			Keterangan
		Anggaran Netto	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	644.648.000	577.764.566	89,62				
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	46.102.000	38.023.755	82,48				
AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	14.950.000	12.654.200	84,64	60	60	orang	100
AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	28.816.000	23.669.555	82,14	75	75	orang	100
AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2.336.000	1.700.000	72,77	30	30	orang	100
4798	Pengelolaan Aset	598.546.000	539.740.811	90,18				
AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	205.275.000	190.780.913	92,94	400	576	Surat Keputusan	100
AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	95.568.000	87.333.619	91,38	180	180	Surat Keputusan	100
ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	84.224.000	80.329.100	95,38	837	1031	Rekomendasi Kebijakan	100
BAH.001	Risalah Lelang	23.032.000	18.408.600	79,93	800	1073	dokumen	100
FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	14.715.000	6.311.093	42,89	1	1	Rekomendasi	100
FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	16.700.000	10.173.300	60,92	2	2	Rekomendasi	100
FAE.007	Penggalan Potensi Lelang	16.032.000	12.648.700	78,90	2	2	Rekomendasi	100
FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	89.122.000	85.078.666	95,46	47	47	Aset	100
UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	53.878.000	48.676.820	90,35	898	1255	Rekomendasi	100

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran Netto	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
WA	Program Dukungan Manajemen	1.746.705.000	1.661.745.481	95,14					
4700	Legislasi dan Litigasi	37.938.000	34.100.000	89,88					
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	37.938.000	34.100.000	89,88	12	12	Layanan	100	
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.666.092.000	1.592.074.081	95,56					
EBA.002	Kerumahtanggaan	113.417.000	84.850.066	74,81	12	12	Layanan	100	
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.390.157.000	1.344.724.015	96,73	12	12	Layanan	100	
EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	162.518.000	162.500.000	99,99	54	54	Unit	100	
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	29.408.000	24.122.400	82,03					
BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	21.280.000	17.964.100	84,42	60	60	Orang	100	
BMB.002	Kehumasan	8.128.000	6.158.300	75,77	4	4	kegiatan	100	
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	13.267.000	11.449.000	86,30					
EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	13.267.000	11.449.000	86,30	7	7	Dokumen	100	
Subtotal		2.391.353.000	2.239.510.047	93,65					
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*									
Total		2.391.353.000	2.239.510.047	93,65					

LAMPIRAN

KPKNL
PALEMBANG
PAYO

KK TELAAH LK

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN (AUDITED) TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537894) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
 Kode dan Nama UAPPAW : (537880) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
------------------	------------	------------

Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	-	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	-	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	-	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	-	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	-	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	-	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	-	Ada

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI

	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	-	Sama

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	-	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	-	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	-	Sama

PENGECHEKAN PADA MONSAKTI

	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	-	✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	-	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	-	✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	-	✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang	-	✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?	-	✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?	-	✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?	-	✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA	-	✓	Tidak
	b. Estimasi PNB	-	✓	Tidak
	c. Belanja	-	✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja	-	✓	Tidak
	e. Pendapatan	-	✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja	-	✓	Tidak
	g. Kas BLU	-	✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran	-	✓	Tidak
	i. Kas Hibah	-	✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung	-	✓	Tidak

	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	-	✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)	-	✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)	-	✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?	-	✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	-	✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?	-	✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)	-	✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual	-	✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas	-	✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bemilai desimal	-	✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓	-	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓	-	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓	-	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓	-	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓	-	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓	-	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓	-	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	-	✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)	-	✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	-	✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	-	✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"	-	✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar	-	✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)	-	✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)	-	✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN	-	✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)	-	✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban	-	✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)	-	✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)	-	✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"	-	✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)	-	✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)	-	✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)	-	✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	-	-	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	-	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial	-	✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI	-	✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya

	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	-	-	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	-	-	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	✓	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	✓	-	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	✓	-	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	✓	-	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	-	✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	-	-	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	-	✓	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓	-	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓	-	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓	-	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓	-	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	-	✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓	-	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal	-	✓	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)	-	✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,	-	✓	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null	-	✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓	-	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	-	✓	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓	-	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	✓	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓	-	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	-	✓	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek	-	✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	✓	Tidak

	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	✓	-	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓	-	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	-	✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)	-	✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya	-	✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"	-	✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	-	✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	-	-	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	✓	-	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	✓	-	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	✓	-	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	✓	-	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	✓	-	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	✓	-	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓	-	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓	-	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓	-	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓	-	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓	-	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	-	✓	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	-	✓	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	-	✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	-	✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	-	✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	-	✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	-	✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	-	✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	-	✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	-	✓	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	✓	-	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX.	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX.	-	-	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	-	-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	-	-	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan

Mengetahui
Penyusun



Ditandatangani secara elektronik
Septi Kurnia Rahayu
NIP 199109282013102001

Palembang, 4 Mei 2026
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik
Iswati
NIP 197604171996032001

MEMO PENYESUAIAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Keuangan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah	: Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
Satuan Kerja	: KPKNL Palembang
No Dokumen	: 16-JB
Tanggal	: 1 Desember 2025
Tahun Anggaran	: 2025
Keterangan	: Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

Pendapatan Diterima di Muka	Kas di Bendahara Penerimaan
V Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Belanja dibayar dimuka	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Belanja yang Masih Harus Dibayar	Persekot gaji
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Selisih Kurs
Penyusutan dan Amortisasi	Transfer
Persediaan	Reklasifikasi
Uang Muka Belanja	Koreksi Antar Beban
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	Koreksi Lainnya
Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.545.904	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		2.545.904

Dibuat oleh,
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Septi Kumia Rahayu
NIP 199109282013102001
Tanggal 4 Mei 2026

Disetujui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto
NIP 197403161998031001
Tanggal 4 Mei 2026

Direkam oleh,
Operator Modul GLP



Ditandatangani secara elektronik
Septi Kumia Rahayu
NIP 199109282013102001
Tanggal 4 Mei 2026

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan
Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah : Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
Satuan Kerja : KPKNL Palembang
No Dokumen : 17-JB
Tanggal : 1 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jumal Balik atas Jumal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 30 Juni 2025

Kategori Jumal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Kas di Bendahara Penerimaan
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
	Belanja dibayar dimuka		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
V	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Persekot gaji
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Selisih Kurs
	Penyusutan dan Amortisasi		Transfer
	Persediaan		Reklasifikasi
	Uang Muka Belanja		Koreksi Antar Beban
	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan		Koreksi Lainnya
	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	6.508.000	
	K	522141	Belanja Sewa		6.508.000

Dibuat oleh,
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Septi Kumia Rahayu
NIP 199109282013102001
Tanggal 4 Mei 2026

Disetujui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto
NIP 197403161998031001
Tanggal 4 Mei 2026

Direkam oleh,
Operator Modul GLP



Ditandatangani secara elektronik
Septi Kumia Rahayu
NIP 199109282013102001
Tanggal 4 Mei 2026

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Keuangan
Eselon I	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Wilayah	: Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
Satuan Kerja	: KPKNL Palembang
No Dokumen	: 18-JP
Tanggal	: 31 Desember 2025
Tahun Anggaran	: 2025
Keterangan	: Jumal Penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2025

Kategori Jumal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Kas di Bendahara Penerimaan
V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
	Belanja dibayar dimuka		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Persekot gaji
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Selisih Kurs
	Penyusutan dan Amortisasi		Transfer
	Persediaan		Reklasifikasi
	Uang Muka Belanja		Koreksi Antar Beban
	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan		Koreksi Lainnya
	Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31.121.480	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		31.121.480

Dibuat oleh,
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Septi Kumia Rahayu
NIP 199109282013102001
Tanggal 4 Mei 2026

Disetujui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto
NIP 197403161998031001
Tanggal 4 Mei 2026

Direkam oleh,
Operator Modul GLP



Ditandatangani secara elektronik
Septi Kumia Rahayu
NIP 199109282013102001
Tanggal 4 Mei 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG

GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG BLOK C LANTAI 1-2, JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 4, KOTA
PALEMBANG, SUMATERA SELATAN 30129;
TELEPON (0711) 317146; FAKSIMILE (0711) 350801; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL
kpknlpalembang@kemenkeu.go.id

BERITA ACARA
NOMOR BA-5/KNL.0402/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (23-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Agus Mulyana
NIP : 197708271999031001
Jabatan : Pelaksana (Operator UAKPB)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang KPKNL Palembang untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : Septi Kurnia Rahayu
NIP : 199109282013102001
Jabatan : Pelaksana (Operator UAKPA)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pada KPKNL Palembang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal KPKNL Palembang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang KPKNL Palembang Tahunan Tahun Anggaran 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. HASIL REKONSILIASI DATA :

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahun 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
I	POSISI BMN DI NERACA	16.678.696.616	643.652.685	17.322.349.301
A	ASET LANCAR	34.631.878	-32.514.105	2.117.773
1	Persediaan	34.631.878	-32.514.105	2.117.773
B	ASET TETAP	16.644.064.738	676.166.790	17.320.231.528
1	Tanah	13.021.688.389	0	13.021.688.389
2	Peralatan dan Mesin	3.266.848.307	770.919.552	4.037.767.859
3	Gedung dan Bangunan	3.642.589.370	0	3.642.589.370
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	17.539.525	0	17.539.525
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	<i>Akum. Penyusutan Aset Tetap</i>	-3.304.600.853	-95.405.777	-3.400.006.630
8	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.530.117.307	-1.169.023.666	361.093.641
9	<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi pemerintahan</i>	-1.530.117.307	1.169.676.681	-360.440.626

C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	<i>Akum. Amortisasi</i>	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0
5	<i>Akum. Penyusutan Aset Lainnya</i>	0	0	0
II	BMN NON NERACA	1.355.010	-542.004	813.006
A	EKSTRAKOMPTABEL	1.355.010	-542.004	813.006
1	BMN Ekstrakomptabel	13.451.406	-9.608.500	3.842.906
2	<i>Akum. Peny. Ekstrakomptabel</i>	-12.096.396	9.066.496	-3.029.900
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
TOTAL (I + II)		16.680.051.626	643.110.681	17.323.162.307

B. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahunan Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Palembang

Operator UAKPB



Ditandatangani secara elektronik
Agus Mulyana

Operator UAKPA



Ditandatangani secara elektronik
Septi Kurnia Rahayu

Mengetahui
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Palembang



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN PALEMBANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 537894 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 23/01/26 2:37

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,644,771,000	2,644,771,000	0
2	Belanja	2,239,510,047	2,239,510,047	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	22,129,246,000	22,129,246,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	31,551,904,271	31,551,904,271	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG 537894

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:27 PM
Halaman : 1
lap_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	22,129,246,000	31,551,904,271	9,422,658,271	143	10,956,027,000	18,865,731,997	(7,909,704,997)	172
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	22,129,246,000	31,551,904,271	9,422,658,271	143	10,956,027,000	18,865,731,997	(7,909,704,997)	172
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	22,129,246,000	31,551,904,271	9,422,658,271	143	10,956,027,000	18,865,731,997	(7,909,704,997)	172
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,644,771,000	2,239,510,047	(405,260,953)	85	2,640,444,000	2,360,608,964	279,835,036	89
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,482,253,000	2,077,010,047	(405,242,953)	84	2,559,417,000	2,279,989,447	279,427,553	89
3. Belanja Modal	162,518,000	162,500,000	(18,000)	100	81,027,000	80,619,517	407,483	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG 537894

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:27 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,644,771,000	2,239,510,047	(405,260,953)	85	2,640,444,000	2,360,608,964	279,835,036
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0
							89
							0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

MARDHANUS RUDIYANTO
NIP 197403161998031001

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:27 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	31,040,314,490	19,226,196,003	11,814,118,487	61.448
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	31,040,314,490	19,226,196,003	11,814,118,487	61.448
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	31,040,314,490	19,226,196,003	11,814,118,487	61.448
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	231,246,786	197,602,543	33,644,243	17.026
Beban Barang dan Jasa	974,205,429	940,686,974	33,518,455	3.563
Beban Pemeliharaan	304,261,171	359,186,755	(54,925,584)	(15.292)
Beban Perjalanan Dinas	606,779,266	794,321,465	(187,542,199)	(23.61)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:27 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	344,547,303	213,362,706	131,184,597	61.484
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(8,438)	(33,750)	25,312	(74.999)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,461,031,517	2,505,126,693	(44,095,176)	(1.76)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	28,579,282,973	16,721,069,310	11,858,213,663	70.918
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	127,024,000	0	127,024,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	127,024,000	0	127,024,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	127,024,000	0	127,024,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	28,706,306,973	16,721,069,310	11,985,237,663	71.677
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	28,706,306,973	16,721,069,310	11,985,237,663	71.677

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

MARDHANUS RUDIYANTO
NIP 197403161998031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:28 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	17,100,186,574	16,073,938,354	1,026,248,220	6.38
SURPLUS/DEFISIT-LO	28,706,306,973	16,721,069,310	11,985,237,663	71.68
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	205,123	(205,123)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	205,123	(205,123)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(28,453,022,765)	(15,695,026,213)	(12,757,996,552)	81.29
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	253,284,208	1,026,248,220	(772,964,012)	(75.32)
EKUITAS AKHIR	17,353,470,782	17,100,186,574	253,284,208	1.48

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

MARDHANUS RUDIYANTO
NIP 197403161998031001

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	1	7,329,282	(7,329,281)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	768,463,486	3,603,870,786	(2,835,407,300)	(78.68)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	7,000,000	(7,000,000)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	31,121,480	406,670,480	(375,549,000)	(92.35)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	1,687,500	(1,687,500)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(8,438)	8,438	(100.00)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	0	1,679,062	(1,679,062)	(100.00)
Persediaan	2,117,773	34,631,878	(32,514,105)	(93.88)
JUMLAH ASET LANCAR	801,702,740	4,061,181,488	(3,259,478,748)	(80.26)
ASET TETAP				
Tanah	13,021,688,389	13,021,688,389	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,037,767,859	3,266,848,307	770,919,552	23.60
Gedung dan Bangunan	3,642,589,370	3,642,589,370	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	17,539,525	17,539,525	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,400,006,630)	(3,304,600,853)	(95,405,777)	2.89
JUMLAH ASET TETAP	17,319,578,513	16,644,064,738	675,513,775	4.06
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	361,093,641	1,530,117,307	(1,169,023,666)	(76.40)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(360,440,626)	(1,530,117,307)	1,169,676,681	(76.44)
JUMLAH ASET LAINNYA	653,015	0	653,015	
JUMLAH ASET	18,121,934,268	20,705,246,226	(2,583,311,958)	(12.48)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	768,463,486	3,605,059,652	(2,836,596,166)	(78.68)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	768,463,486	3,605,059,652	(2,836,596,166)	(78.68)
JUMLAH KEWAJIBAN	768,463,486	3,605,059,652	(2,836,596,166)	(78.68)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	17,353,470,782	17,100,186,574	253,284,208	1.48
JUMLAH EKUITAS	17,353,470,782	17,100,186,574	253,284,208	1.48
JUMLAH EKUITAS	17,353,470,782	17,100,186,574	253,284,208	1.48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,121,934,268	20,705,246,226	(2,583,311,958)	(12.48)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

**SATUAN KERJA : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG**

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARDHANUS RUDIYANTO

NIP 197403161998031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:29 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	768,463,486	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31,121,480	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,117,773	0
0.0	131111	Tanah	13,021,688,389	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,037,767,859	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,642,589,370	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	17,539,525	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,064,381,421
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	335,625,209
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	361,093,641	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	360,440,626
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	768,463,486
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,239,510,047
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	31,551,904,271	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	356,366
0.0	313221	Transfer Masuk	0	859,015,093
0.0	391111	Ekuitas	0	17,100,186,574
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	127,024,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	28,466,215,964
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,348,377,430
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	222,383,153
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,837,943
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	696,358,849	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11,636,780	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	26,709,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	105,840,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	19,706,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	52,621,800	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	43,600,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	17,732,500	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29,284,966	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	274,976,205	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	524,234,266	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,545,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	287,526,452	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56,694,344	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:29 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	326,507	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	231,246,786	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,438
JUMLAH			55,895,325,750	55,895,325,750

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARDHANUS RUDIYANTO

NIP 197403161998031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,239,510,047
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	31,551,904,271	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	127,024,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	1,500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	28,841,764,964
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,348,377,430
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	229,712,434
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	1,687,500
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,837,943
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	696,358,849	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11,636,780	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	26,709,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105,840,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,706,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	52,621,800	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	43,600,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	197,931,681	0
3.0	522141	Belanja Sewa	18,565,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29,284,966	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	267,976,205	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	524,234,266	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,545,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162,500,000	0
JUMLAH			33,791,414,318	33,791,414,318

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MARDHANUS RUDIYANTO

197403161998031001

LPJ BENDAHARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (11.51) SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG
Satuan Kerja : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537894/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (014) Palembang
Alamat dan No Telp : Gedung Keuangan Negara, Gedung C. Jalan Kapten A. Rivai No. 4 , 0711352574 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 768.463.486,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	3.515.443.943,00	38.420.739.892,00	41.167.720.349,00	768.463.486,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	3.515.443.943,00	38.420.739.892,00	41.167.720.349,00	768.463.486,00
B.	BP Selain Kas	3.515.443.943,00	38.420.739.892,00	41.167.720.349,00	768.463.486,00
	1. BP PNB	0,00	1.182.701.957,00	1.182.701.957,00	0,00
	2. BP DPK	3.515.443.943,00	36.668.841.985,00	39.415.822.442,00	768.463.486,00
	3. BP Pajak	0,00	569.195.950,00	569.195.950,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	768.463.486,00
3.	Jumlah Kas	Rp	768.463.486,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	768.463.486,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	768.463.486,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	1.751.897.907,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.751.897.907,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.751.897.907,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	1.182.701.957,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.383.942.636,00
3. Selisih	Rp	- 201.240.679,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 201.240.679,00 karena Selisih dikarenakan adanya Bea Pendaftaran Lelang, Bea Pembatalan Lelang, serta Bea Lelang Pegadaian yang disetorkan langsung ke Kas Negara

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



MARDHANUS RUDIYANTO
NIP 197403161998031001

KOTA PALEMBANG , 07 Januari 2026

Bendahara Penerimaan



IRFAN HALIMI
Penata 198609222007101001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
 SATKER 537894 (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG)

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	005901000179301	RPL 014 KPKNL Palembang utk Piutang	BRI Cabang Palembang A. Rivai	30	S-3518/MK.5/2015	29-04-2015	31-12-2025	0.00
2	1120009003000	RPL 014 KPKNL PALEMBANG UTK LELANG	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CABANG PALEMBANG A. RIVAI	30	S-3518/MK.5/2015	29-04-2015	31-12-2025	768,463,486.00

Bendahara Penerimaan,



IRFAN HALIMI
 NIP 198609222007101001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara
 ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya
 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
 diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG

Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai 1-2 Jalan Kapten A. Rivai No.4
TELEPON 0711325574; FAKSIMILE 0711350801; EMAIL kpknl_palembang@yahoo.co.id

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
Per 31 Desember 2025

No.	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2025
A.	Dana Milik Pemerintah/ DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas :	
	1. Biaya Administrasi PPN	Rp 0,00
	2. Bea Lelang	Rp 0,00
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp 0,00
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp 0,00
	5. Lain-lain (Kelebihan Pelunasan Lelang)	Rp 0,00
	6. PPh	Rp 0,00
	Jumlah A	Rp 0,00
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindah - bukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari :	
	1. Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp 0,00
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp 0,00
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp 0,00
	4. Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp 0,00
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/ Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 0,00
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 0,00
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 0,18
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 768.463.486,92
	9. Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp 0,00
	10. Lain-lain Lelang	Rp 0,00
	11. Lain-lain Piutang	Rp 0,00
	Jumlah B	Rp 768.463.487,10
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp 0,00
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp 0,00
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 768.463.487,10

Mengetahui:
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara

Palembang, 31 Desember 2025
Bendahara Penerimaan



Ditandatangani secara elektronik
Desty Marlina
NIP 19790326 200212 2 001



Ditandatangani secara elektronik
Irfan Halimi
NIP 19860922 200710 1 001



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (11.51) SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG

Satuan Kerja : (537894) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG

Alamat dan No Telp : Gedung Keuangan Negara, Gedung C. Jalan Kapten A. Rivai No. 4 , 0711352574

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537894/2025

Tahun : 2025

KPPN : (014) Palembang

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00093/DRPP/537894/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	4.173.399,00	309.890.265,00	314.063.664,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	4.173.399,00	309.890.265,00	314.063.664,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	4.173.399,00	221.386.906,00	225.560.305,00	0,00
	1. BP UP*)	4.173.399,00	147.572.151,00	151.745.550,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	72.467.065,00	72.467.065,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	1.347.690,00	1.347.690,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



MARDHANUS RUDIYANTO
NIP 197403161998031001

KOTA PALEMBANG, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



YATINEMI ARSIH OKTAVIA
NIP 197704132005012001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 537894

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100125378941000	BPG 014 KPNIL PALEMBANG	Mandiri KC Jakarta Departemen Keuangan	20	S-789/WPB.12/KP.02/2020	18-02-2020	2025-12-31	0.00
2	1120011899213	RPL 014 KPNIL Palembang Utk PS TKPN	Bank Mandiri Cabang Palembang KPPN	30	S-9080/MK.5/2016	10-11-2016	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



YATINEMI ARSIH OKTAVIA

NIP 197704132005012001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya